

PERILAKU POLITIK MENYIMPANG DALAM KONTESTASI PEREBUTAN KEKUASAAN

Yan Ariyani
Program Studi Psikologi
Universitas Trunojoyo Madura
yan.ariyani@yahoo.com

Abstrak

Politik merupakan alat yang digunakan untuk sampai pada tujuan yang dikehendaki oleh individu, kelompok, masyarakat, institusi ataupun negara. Proses politik ini sering dilakukan oleh masyarakat kelas menengah keatas, meskipun masyarakat menengah ke bawah tidak menutup kemungkinan juga bisa melakukannya. Perilaku politik menyimpang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu dengan jalan tidak normal, bisa berupa kampanye hitam, hoax, cyber crime dan fitnah. Mereka melakukan perilaku menyimpang, karena mereka tidak cukup cerdas untuk beradu program kerja yang bermanfaat untuk masyarakat. Banyak pemeran politik atau politikus hanya memiliki keinginan tapi kurang memiliki kemampuan dalam mengelola seninya berpolitik dalam lingkungan masyarakat.

Kata kunci: Politik, Kekuasaan

PENDAHULUAN

Perilaku politik merupakan bagian dari perilaku sosial, dan perilaku sosial sangat dipengaruhi oleh sistem sosial, maka Zimmerman dan Pollner (1970) merumuskan bahwa *Perilaku politik = Fungsi (sistem sosial)*. Namun para ahli Psikologi Individual beranggapan bahwa oleh karena unsur individu dan keunikannya lebih kuat pengaruhnya terhadap perilaku individu dibanding pengaruh unsur sosialnya, maka perilaku politik seseorang perlu lebih memperhatikan pada aspek-aspek yang terdapat pada dirinya dalam berperilaku politik itu. Pandangan-pandangan diatas perlu digaris-bawahi dalam menelusuri pengertian dan dinamika terjadinya perilaku politik menyimpang. Dalam pemahaman umum, psikologi mengaitkan unsur kesehatan mental dalam merumuskan dan memahami tingkah laku menyimpang sebagai tingkah laku yang dirasakan sebagai mengganggu dirinya (*complain*) atau mengganggu lingkungan atau orang lain (*sign* atau *symptom*). Dengan demikian perilaku politik menyimpang dapat diartikan sebagai perilaku politik yang menimbulkan gangguan mental bagi dirinya sendiri atau orang lain; atau perilaku politik yang dirasakan sebagai gangguan oleh atau menimbulkan gangguan pada orang lain: bukan semata-mata karena bertentangan atau melawan hukum. Hukum memang dibuat untuk memungkinkan diberikannya *punishment* terhadap sesuatu yang menimbulkan gangguan psikis maupun fisik terhadap manusia.

Reward dan *punishment* dikenal dalam psikologi sebagai instrumen yang dibutuhkan dalam proses pembentukan tingkah laku dan kepribadian. Perilaku politik menyimpang juga dirasakan sebagai gangguan oleh yang bersangkutan sendiri karena menimbulkan dampak tekanan (*stress*), *tension*, *maladjustment*, terutama karena reaksi diri dan lingkungan terhadap perilakunya tersebut. Suatu proses rekrutmen yang keliru dalam kepemimpinan partai sehingga menempatkan seseorang berkecerdasan rendah sebagai pimpinan partai, sementara masalah politik yang dihadapinya memerlukan kecerdasan tinggi untuk mampu meyakinkan masyarakat akan gagasan dan keinginan partainya; akan mengakibatkannya mengalami gangguan psikis karena ketidakmampuan. Dilain pihak, masyarakat akan merasa terganggu pula oleh karena masalah yang dihadapinya tidak mampu diatasi dengan cerdas dan baik yang berakibat penderitaan padanya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selama lima puluh lima tahun merdeka, di Indonesia perilaku politik seringkali ditampilkan melalui corak perilaku yang tidak menampilkan cukup kecerdasan. Banyak masalah kehidupan berbangsa dan bernegara diselesaikan dengan pola perilaku yang menampilkan ciri: kecerdasan rendah, emosionalitas tidak terkendali, interaksi sosial buruk, kurang mengindahkan norma, aturan, values, cenderung menonjolkan kehebatan diri sendiri atau kelompok sehingga akan menghambat penyesuaian diri dengan alam lingkungannya. Menarik untuk disimak bahwa dalam perjalanan sejarah Indonesia, momen momen terpenting yang dijalani dalam kehidupan berbangsa bernegaranya; banyak melibatkan unsur dan peran cendekiawan dalam pengambilan keputusannya. Sebagaimana dapat terlihat pada awal kemerdekaan, penyusunan naskah kemerdekaan, konstitusi dan ideologi, perjuangan diplomasi mempertahankan integritas wilayah Indonesia melawan agresi Belanda dengan negara boneka dan separatismenya. Momen-momen tersebut ditandai oleh setting perilaku yang cerdas, emosi yang matang terkendali, motivasi dedikatif yang tinggi dalam kebersamaan sebagai bangsa diatas kepentingan golongan/kelompok/partai. Ironis bahwa setelah Indonesia merdeka dan menghasilkan lebih banyak orang terdidik bahkan yang berhimpun dalam organisasi dengan menonjolkan atribut kecendekiawanan, justru perilaku politik yang dihasilkannya menampilkan pola setting sebaliknya: tidak cerdas, emosional tidak terkendali, moralitas rendah, norma dan values ditafsirkan bagi kepentingan diri sendiri/kelompok/golongan dengan mengorbankan bangsa atau orang lain. Kondisi menyimpang dalam perilaku berbangsa bernegara ini membawa Indonesia pada titik nadir, lebih buruk dari sebelum proklamasi kemerdekaan. Jadi kelirulah anggapan

bahwa kita sudah mengalami proklamasi yang kedua, padahal kenyataannya kita menampilkan symptom perilaku menyimpang.

PEMBAHASAN

Patterson (2004) konsep perilaku politik ditemukan dalam bentuk: aktifitas pemerintahan dan negara, adu kuat pengaruh dan kekuasaan dalam negara, aktifitas sosial kemasyarakatan, aktifitas mendayagunakan negara bagi kesejahteraan warganya, pendayagunaan warga bagi berfungsinya negara. Penyimpangan perilaku politik akan terjadi bila fungsi negara ditujukan bagi terciptanya gangguan terhadap kehidupan warga negaranya. Dan harus diakui selamaini, perilaku politik dominan yang kita temukan dalam bentuk-bentuk yang dikemukakan Patterson tersebut, hampir selalu berdampak bahkan nyata-nyatadiarahkan Negara (c.q. pemerintah, legislatif, yudikatif pusat dan daerah) untuk terjadinya gangguan terhadap kehidupan warganegaraanya.

1. Politisi kurang memiliki seninya berpolitik

Politik merupakan cara melakukan sesuatu dalam kehidupan, ketika para politisi kurang memiliki seninya berpolitik, maka tidak jarang mereka melakukan politik dengan cara yang kurang baik. Seperti melakukan kampanye hitam, hoax, menyebarkan fitnah dan melakukan konspirasi. Karena mereka tidak memiliki kecerdasan tinggi dalam merespon konflik dalam lingkungan. Apalagi dalam berpolitik itu diperlukan partisipasi yang memadai untuk bisa diterima di semua kalangan. Huntington (1994) mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara (private citizen) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Definisi ini mensyaratkan bahwa yang tercakup dalam partisipasi politik adalah kegiatan, dengan demikian orientasi-orientasi para warga negara terhadap politik, pengetahuan tentang politik, minat terhadap politik, perasaan-perasaan mengenai politik kompetisi dan keefektifan politik, persepsi-persepsi tentang relevansi politik, itu seringkali juga tidak berkaitan. Persoalan mendasar yang menjadi perhatian dalam partisipasi politik hanyalah kegiatan politik yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Kegiatan kegiatan yang demikian difokuskan terhadap pejabat pejabat umum, mereka yang pada umumnya diakui mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan final tentang pengalokasian nilai-nilai secara otoritatif dalam masyarakat. Sebagian besar dari apa yang dinamakan politik, dan sebagian besar pengalokasian sumber-sumber daya diantara golongan-golongan dalam masyarakat dapat berlangsung tanpa campur tangan pemerintah. Dengan demikian maka besarnya partisipasi politik di

dalam suatu masyarakat, sampai tingkat tertentu tergantung kepada lingkup kegiatan pemerintah di dalam masyarakat.

Penyimpangan perilaku politik hanya akan terjadi bilamana terjadi perubahan pada perilaku politik itu sendiri, yaitu mau dan bersedia berperilaku sesuai dengan sistem sosial yang telah disepakati. Bukannya mengkambing hitamkan semata sistem sosial sebagai sumber dari penyimpangan perilaku yang dilakukannya. Seorang dewasa yang menjadi penderit kecanduan narkoba, tidak layak mengatakan bahwa itu terjadi karena ada pengedar yang dengan mudah ditemuinya di sekitar lingkungannya. Dia menderita kecanduan narkoba karena dia sendiri memilih menjadi orang yang rapuh iman tergoda untuk mencoba menikmati narkoba. Paradigma psikoterapi saat ini lebih memilih penyembuhan dilakukan terhadap perilaku pasien yang menyimpang itu sendiri daripada mengutak-atik lingkungannya yang memang tidak pernah datang ke tempat praktek terapis untuk dirawat sebagai pasien. Penyembuhan harus dilakukan dengan memperkuat pasien agar tahan dan mampu mengatasi setiap gangguan. Darimana pun datangnya, baik dari lingkungan maupun dari sumber didalam dirinya sendiri. Analog dengan kondisi Indonesia untuk dapat bertahan sebagai bangsa dan negara dalam milenium ini, perubahan perilaku kearah penguatan kehidupan berbangsa bernegara lebih perlu kita lakukan di dalam diri bangsa dan Negara ketimbang mempersalahkan bangsa lain bahkan dunia global yang dianggap mencoba mengambil keuntungan dari kisruhnya kelakuan kita sendiri.

2. Sistem politik yang berjalan abnormal

Stanley Milgram (1974) memodifikasi pandangan Zimmerman dengan menyatakan bahwa: $B = F(S)$ (Response Situations). Kalau mengacu pada pandangan Zimmerman, maka perilaku politik menyimpang dapat terjadi oeh karena orang berespon terhadap sistem sosial secara keliru atau sistem sosial menyimpanglah yang membuat orang menjadi berperilaku politik menyimpang. Oleh karena, Stanley Milgram berpendapat bahwa perilaku politik merupakan respon semata terhadap situasi yang dihadapinya; maka bentuk respon tersebut bukanlah semata-mata karena orang melakukan penyesuaian terhadap situasi yang dihadapinya itu secara pasif. Pada kenyataannya manusia dapat pula berlaku aktif dengan memilih dalam situasi apa dia mau memberikan respon; bahkan bilamana perlu manusia dapat pula melakukan perubahan atau merekayasa situasi yang akan dipilihnya untuk direspon. Bila dikaitkan dengan pengertian perilaku politik dalam artian luas atau sempit sebagaimana

diutarakan pada awal tulisan ini, penerapannya dalam perilaku politik menyimpang yang banyak ditemukan pada masyarakat dan pelaku politik serta pemerintahan kita dewasa ini haruslah kita simpulkan bahwa bagaimanapun perubahan sistem sosial diutak-atik diupayakan untuk dirubah melalui hukum, peraturan, undang-undang dan semacamnya belum akan menghentikan penyimpangan perilaku politik. Padahal upaya itu memerlukan biaya sosial dan material sangat besar; sementara hasilnya sudah diperkirakan tidak akan terlalu berarti.

Lewin (1992) mengartikan perilaku politik sebagai, "*participations by individual in a group decision making process*" Negara dan bangsa adalah suatu bentuk pengorganisasian individu manusia dalam pengelompokan terbesar secara formal, efektif, dan teridentifikasi yang pernah dikenal dan dihasilkan oleh sejarah peradaban umat manusia hingga saat ini. Dengan demikian, perilaku politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah perilaku yang menampilkan kegiatan pelibatan dan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan yang dibuat (dari dan) bagi kehidupan bangsa negara. Terdapat pula pandangan bahwa perilaku politik adalah perilaku-perilaku yang terdapat pada apa yang kita rumuskan sebagai dunia politik dengan segala tingkah polah yang terjadi didalamnya.

Jadi, dalam artian luas, tingkah laku politik adalah merupakan tingkah laku yang akan kita temukan pada setiap individu manusia karena saat ini hampir setiap individu manusia tentulah akan menjadi warga negara dari suatu bangsa dan negara. Kata negara dan bangsa pun saat ini hampir selalu disebutkan sebagai satu kata majemuk karena peradaban modern manusia saat ini memberikan tempat sangat sedikit bagi suatu negara etnik, rasial, mistis, religi, atau agama. Keikutsertaan atau ketidakikutsertaan menggunakan hak suara dalam pemilihan umum dari seorang warga manusia adalah wujud perilaku politik dalam pengertian ini. Tentu saja banyak bentuk dan contoh lainnya yang dapat disusulkan. Hatta Albanik (2000). Di pihak lain, dalam artian sempit, perilaku politik adalah perilaku manusia yang melakukan aktifitas di dalam lingkungan kehidupan politik (yang ruang lingkungannya tergantung pada rumusan dan pengertian yang dibuatkan oleh masyarakat dan lingkungannya). Dalam pengertian ini, perilaku politik hanyalah perilaku yang ditemukan pada manusia-manusia yang menjadi insan politik dan terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan untuk (serta) oleh negara, seperti: anggota partai, parlemen, negarawan, politisi. Adanya anggapan banyak ahli bahwa pada hakekatnya manusia adalah *zoon politicon* (insan politik) kiranya dapat mengkonvergensi dua pengertian tersebut lebih cenderung pada artian perilaku

politik dalam artian luar dan bukannya monopolisemata para politisi dan sejenisnya saja.

3. Pengendalian konflik kepentingan

Berbicara konflik ini kemudian akan berkaitan dengan kepentingan, konflik ini muncul karena ada kepentingan-kepentingan yang berbeda saling bertemu. Kepentingan disini adalah kepentingan dari orang, kelompok, atau golongan-golongan yang ada dalam masyarakat. Mengingat di dalam masyarakat Indonesia khususnya, dimana dengan berbagai macam keberagaman yang ada baik itu golongan, agama, etnis ataupun yang bersifat sektoral. Tentunya akan banyak sekali kepentingan yang akan saling berbenturan, hal ini tentunya akan membawa dampak yang luar biasa ketika dibiarkan begitu saja. Memang konflik dalam masyarakat itu tidak bisa dihilangkan tetapi yang harus dilakukan adalah bagaimana manajemen konflik tersebut supaya konflik tersebut sifatnya tidak merusak hubungan antar golongan tadi dengan cara-cara kekerasan. Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan kedalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik untuk memberikan kontrol dalam situasi sosial.

Yudhi (2011) kontrol politik ialah kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintahan. Produk dari pemerintahan ada suatu kebijakan, kebijakan-kebijakan ini yang kemudian akan menyangkut kepentingan masyarakat secara umum. Baik buruknya kebijakan tentunya sangat bisa diperdebatkan mengingat kebijakan pemerintah tidak akan pernah mungkin bisa memberikan kepuasan kepada semua orang. Permasalahan yang muncul adalah kepada siapa kebijakan itu akan memberi keuntungan. Pada titik inilah kemudian kontrol partai politik memainkan fungsinya untuk menyikapi suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait kelemahan yang ada dan kemana alokasi nilai-nilai dari kebijakan itu akan diberikan. Ketika suatu kebijakan telah dibuat dan dimplementasikanpun perang partai politik masih diperlukan untuk mengawal kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan awal yaitu untuk apa kebijakan itu dibuat. Ketika kebijakan itu sudah menjadi keputusan tidak serta merta dapat menyelesaikan permasalahan seperti yang telah direncanakan. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya kebijakan

tersebut dalam menyelesaikan masalah. Dalam proses penyelesaian masalah memerlukan pendidikan politik untuk proses pendewasaan pada setiap warga negara.

Mujtahid (2013) pendidikan politik adalah pendidikan kewarganegaraan untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara atau lebih tepat lagi disebut pendidikan politik adalah pendidikan demokrasi pendidikan yang mewujudkan masyarakat demokratis, yaitu masyarakat yang bebas yang hanya dibatasi oleh kebebasan itu sendiri, bukan masyarakat kolektivisme yang “terpasung” oleh atribut-atribut agama atau norma-norma budaya. Pendidikan politik mampu melahirkan budaya politik yang sehat, yang hingga pada akhirnya berhasil mewujudkan masyarakat demokratis yang bebas dari bias apapun. Politik yang sehat tentu menjadi syarat utama dalam menghasilkan masyarakat demokratis tersebut. Sebab, tanpa berjalannya politik yang sehat maka tentu masyarakat demokratis atau demokrasi itu sendiri kehilangan arahnya sehingga muncullah kebebasan yang tidak terkontrol, yang pada akhirnya mencederai demokrasi itu sendiri. Maka perluda rekrutmen politik untuk mengetahui kapasitas dari kader, sebagai proses kaderisasi partai.

Yudhi (2011) Rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya. Dari partai politiklah diharapkan ada proses kaderisasi pemimpin-pemimpin ataupun individu-individu yang mempunyai kemampuan untuk menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan jabatan yang mereka pegang. Dalam alam demokrasi walaupun individu disini diberikan kesempatan sama untuk mencapai derajat tertentu, untuk mendapatkan suatu hal tetapi ada aturan bagaimana cara individu tersebut mencapai hal tersebut melalui undang-undang atau peraturan yang ada. Dengan adanya partai politik maka individu-individu tadi akan lebih mudah untuk mendapatkan keinginnya di bidang politik, dalam artian walaupun tanpa partai politikpun bisa mendapatkannya tetapi tentunya akan lebih sulit.

Pemilih-pemilih pemula, sebenarnya membutuhkan penjelasan tentang apa pemilu, demokrasi, hak-hak rakyat, kewajiban warga negara, bagaimana pemilu yang berkualitas, serta bagaimana agar warga negara bisa ikut berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam pesta demokrasi. Untuk melaksanakan fungsi penjelas berbagai persoalan tersebut, lembaga pendidikan secara moral memiliki tanggung jawab etis atas persoalan-persoalan bangsa. Etika politik bangsa harus dibenahi melalui pendidikan politik pada anak didiknya. Penelitian yang dilakukan Agus Marsidi (2001) menunjukkan bahwa, guru dapat berperan sebagai desinator nilai, norma dan perilaku

politik secara profesional. Aktualisasi profesionalisme tersebut dapat dilihat dari perspektif orientasi politik guru ketika menjalankan peran penanggung jawab (berdasarkan kompetensi) pendidikan politik secara formal di sekolah. Hal tersebut dapat dibagi menjadi dua macam:

- a. Jika guru berorientasi kepada kepentingan negara (pemerintah/regime), maka dia berperan sebagai agent, karena dia akan bertindak sebagai mediator atau pelaksanaan sosialisasi politik berdasarkan ideologi penguasa. Guru adalah pencapai target kurikulum yang telah ditetapkan birokrasi pemerintah. Biasanya mereka bersikap sebagai intellectual organic, bagian dari birokrasi dan *state society*, sehingga guru berperan sebagai media untuk legitimasi regime.
- b. Jika guru berperan sebagai *agency*, maka dia akan bertindak sebagai pengembang kurikulum. Guru memiliki otoritas dalam melaksanakan tugas, berorientasi pada *civil society*, kreatif dalam mengembangkan *hidden curriculum* sehingga pendidikan politik yang dilakukan mempunyai tujuan untuk *national character building*.

Peran perguruan tinggi dalam pendidikan politik menjadi sangat strategis karena ia dapat menjadi sebagai intermediasi sebagaimana halnya pers. Walaupun tetap saja memiliki keterbatasan karena ia juga harus bekerja menggunakan pers. Sehingga diperlukan terobosan perguruan tinggi melakukan pendidikan politik melalui pendampingan, agar masyarakat lebih kritis mensikapi kompetisi politik secara baik dan secara kuat, apalagi bagi masyarakat yang akan memperjuangkan kepentingan mereka sebagai kandidat.

Bahkan menurut Amal (2008), dapat dikatakan bahwa harapan terbesar bagi pendidikan politik bagi warga negara sebenarnya diharapkan dari pers. Pers juga mempunyai peranan dalam pelaksanaan pemilu dalam hal melaporkan praktik-praktik kecurangan yang dilakukan sejak tahap pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara. Pemilu tidak akan mengalami perbaikan jika publik tidak mendapatkan informasi yang benar dan berimbang menyangkut sistem pemilihan serta kualitas calon legislative dan calon presiden. Informasi melalui pers mengenai pelaksanaan pemilu dan kualitas calon, merupakan sarana bagi publik untuk melakukan *fit and proper test* untuk menjatuhkan pilihan terhadap calon pemimpinnya. Hal ini bisa dilakukan jika pers memberitakan sesuatu secara benar dan profesional. Dalam sistem demokrasi, persaingan memperebutkan kekuasaan politik dapat dilakukan secara terbuka, dengan menggunakan beragam cara untuk merebut simpati pemilih. Cara tercepat dan termudah salah satunya adalah melalui ekspos pers. Dalam fungsinya sebagai sarana sosialisasi

dan informasi, pers diharapkan dapat ikut memberikan pendidikan pada masyarakat untuk menciptakan pemilu yang jujur dan adil serta damai. Hal itu dapat tercapai jika pers selalu berpegang teguh pada prinsip jurnalisme yang profesional dan beretika. Pers dapat berfungsi optimal mendukung pendidikan politik dengan terlibat secara kritis memberikan gambaran yang lengkap, akurat dan seimbang tentang calon legislatif serta calon presiden dengan tetap bersifat independen.

KESIMPULAN

Partai politik dengan fungsi komunikasi dan sosialisasi politiknya akan membawa kepada pencerahan yang rasional kepada masyarakat untuk kegiatan politik. Dengan fungsi tersebut kemudian diharapkan akan memunculkan kesadaran masyarakat terkait nasibnya di masa yang akan datang. Nasib mereka dimasa yang akan datang tersebut akan sangat bergantung pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, presiden, gubernur atau walikota dan bupati, apakah itu dewan perwakilan rakyat pusat atau dewan perwakilan daerah. Dari pihak-pihak tersebutlah kebijakan yang ditujukan untuk mengalokasikan nilai-nilai (ekonomi, pendidikan, kesehatan dan yang lain) akan dibuat dan diperuntukan kepada masyarakat luas. Partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan kepemimpinan pemerintah.

Instropeksi dan restropeksi dalam kehidupan keprilakuan politik sangat perlu dilakukan untuk menemukan dan menciptakan pemimpin yang luar biasa. Peranan pemimpin dan aktifis politik seharusnya kembali mampu membimbing masyarakat luas tentang bagaimanaseharusnya berperilaku dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sebagaimana dengan berhasil telah ditampilkan oleh para perintis pergerakan kemerdekaan, pendiri bangsa dan pejuang pembela bangsa terdahulu. Perilaku politik mereka telah berhasil menjadi teladan dan penyuluh tentang bagaimana seharusnya rakyat harus berperilaku dalam hidup berbangsa dan bernegara. Notabene sebagian besar rakyat Indonesia masa itutidak pernah mengenal bagaimana arti negara, bangsa, proklamasi bahkan 'Indonesia'. Namun teladan perilaku membuat mereka mau berkorban memberikan apapun yangmereka miliki demi hidup berbangsa serta bernegara merdeka.

PUSTAKA

- Amal, Ichlasul. 2008. *Peran Media Massa dalam Menyukkseskan Pemilu 2009*. Paper dipresentasikan dalam Forum Koordinasi dan Konsultasi yang diselenggarakan Menko Polhukam, di Jakarta, tanggal 22 Oktober 2008.
- Hatta Albanik (2000), *Telaah Psikologi Tentang Perilaku Politik Menyimpang dan Perilaku Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Indonesia*, Jurnal Psikologi Vol. 6 September 2000.
- Huntington, Samuel. dan Joan Nelson. 1990. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kurt Lewin M. Keller. 1992. *Instructional Design Theory and Models : An Overview of Their Current Status*, Charles M. Regeluth (ed), Lawrence Erlbaum Associates, London.
- M. Mujtahid Iqbal. 2013. *Pendidikan Politik Terpadu Bagi Masyarakat Menuju Pemilu 2014 Sesuai dengan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas*.
- Marsidi, Agus. 2001. *Peran Guru PPKn sebagai Agent atau Agency dalam Pendidikan*.
- Melvin Pollner, Don H. Zimmerman. 1970. "*The everyday world as a phenomenon*", *In Understanding everyday life: towards a reconstruction of sociological knowledge*. (Jack D. Douglas, ed.), Chicago, Aldine Publishing, pp. 80-103.
- Patterson, D. A., and J. L. Hennessy. 2004. *Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface, third edition*, Morgan Kaufmann, San Francisco.
- _____. *Politik di Sekolah*. Laboratorium PPKn Universitas Negeri Malang.
- Rousseau, J.J. 1948. *The Social Contract*, London: George Allen and Unwin.
- Schmandt, Henry.J. 2002. *Filsafat Politik: Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*, Penerjemah: Ahmad Baidlowi dan Imam Bahehaki, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.